



eISSN 3032-601X & pISSN 3032-7105

Vol. 1, No. 3, 2024

MISTER

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 1, No. 3, 2024

Pages: 326–331

Analisis Ekonomi Politik Liberalisme Otoriter Pemerintah dan Kemunculan *Regulatory State* Pasca Krisis di Asia Timur

Agis Salwa, Eli Apud Saepudin, Osi Anggraeni, Ananta Rahayu,
Suci Juita Ramadhani

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina
Bangsa, Kota Serang, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v1i3.1519>

How to Cite this Article

APA : Salwa, A., Saepudin, E. A., Anggraeni, O., Rahayu, A., & Ramadhani, S. J. (2024). Analisis Ekonomi Politik Liberalisme Otoriter Pemerintah dan Kemunculan Regulatory State Pasca Krisis di Asia Timur. *MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(3), 326 – 331. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i3.1519>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Analisis Ekonomi Politik Liberalisme Otoriter Pemerintah dan Kemunculan *Regulatory State* Pasca Krisis di Asia Timur

¹Agis Salwa, ²Eli Apud Saepudin, ³Osi Anggraeni, ⁴Ananta Rahayu,
⁵Suci Juita Ramadhani

^{1,2,3,4,5} Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa,
Kota Serang, Indonesia

Email Korespondensi: slwaagis@gmail.com

Diterima: 25-04-2024

| Disetujui: 27-04-2024

| Diterbitkan: 02-05-2024

ABSTRACT

The economic crises in Japan in the early 1990s and in Southeast Asia in 1997-1998 had significant impacts on the economies and political stability of the respective regions. This research reveals that the economic crisis in Japan was triggered by the collapse of the bubble economy and the failure of government macroeconomic policies, while the crisis in Southeast Asia was caused by various factors such as currency speculation, high foreign debt, and weak financial systems. The economic development model in East Asia, which combined economic liberalization with tight political control, faced serious challenges due to the economic crisis, highlighting the need for economic policy adjustments to restore the economy. Changes in Japan's economic policies post-crisis marked a decline in government intervention in the economy and an increase in pressure from interest groups. This study provides valuable insights into the challenges and adaptations in facing global economic crises and the importance of prompt and appropriate responses from governments and stakeholders to mitigate the negative impacts of economic crises.

Keywords: *The Political Economy of Liberalism; Authoritarian Government; The Emergence of the Regulatory State; Pasca Crisis in East Asia.*

ABSTRAK

Krisis ekonomi di Jepang pada awal tahun 1990-an dan di Asia Tenggara pada tahun 1997-1998 memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi dan stabilitas politik di wilayah tersebut. Penelitian ini mengungkapkan bahwa krisis ekonomi Jepang dipicu oleh runtuhnya bubble economy dan kegagalan kebijakan makroekonomi pemerintah, sementara krisis di Asia Tenggara disebabkan oleh berbagai faktor seperti spekulasi mata uang, utang luar negeri yang tinggi, dan sistem keuangan yang lemah. Model pembangunan ekonomi di Asia Timur yang menggabungkan liberalisasi ekonomi dengan kontrol politik ketat mengalami tantangan serius akibat krisis ekonomi, menunjukkan perlunya penyesuaian kebijakan ekonomi untuk memulihkan perekonomian. Perubahan dalam kebijakan ekonomi Jepang pasca-krisis menandai penurunan pengaruh intervensi pemerintah dalam perekonomian dan peningkatan tekanan dari kelompok kepentingan. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang tantangan dan adaptasi dalam menghadapi krisis ekonomi global serta pentingnya respons yang cepat dan tepat dari pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memitigasi dampak negatif krisis ekonomi.

Katakunci: Ekonomi Politik Liberalisme; Otoriter Pemerintah; Kemunculan *Regulatory State*; Pasca Krisis di Asia Timur.

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi di Asia Tenggara selama 1997-1998 memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi lokal. Krisis ini telah mengakibatkan pemulihan ekonomi yang lemah, peningkatan kemiskinan, dan ketidakstabilan politik. Pemerintah di Asia Timur telah menerapkan berbagai kebijakan, termasuk kebijakan ekonomi politik untuk mengatasi krisis ini. Karena krisis ini, ekonomi di beberapa negara Asia runtuh, yang mengakibatkan penurunan nilai mata uang seperti pada negara Thailand (Baht), Malaysia (ringgit), Singapura (dolar Singapura), Indonesia (rupiah), dan Korea Selatan (won). Bila dilihat dalam hitungan persen Korea Selatan mengalami penurunan -39,0% untuk (won), Thailand -37,5% untuk (Baht), dan Indonesia -73,9% untuk (rupiah) (Nugroho, 2011).

Seperti yang ditunjukkan, Indonesia adalah negara yang terkena akibat yang paling parah pada saat itu. Sebaliknya, kemiskinan terus meningkat karena pemerintah Indonesia tidak memberikan perhatian yang cukup kepada masyarakatnya, yang sebagian disebabkan oleh musibah nasional yang bertubi-tubi, seperti kekeringan yang menghambat panen, dan kebakaran hutan. Selain itu, sektor konstruksi mengalami kontraksi 36,44%, disusul oleh sektor keuangan, persewaan, dan jasa-jasa perusahaan. Industri berat seperti mesin, baja, mobil, dan bahan konstruksi mengalami produksi terbesar. (Karmeli, 2008)

Salah satu teori ekonomi politik yang sedang diterapkan adalah liberalisme otoriter. Liberalisme adalah paham akan kebebasan. Individu diberi kebebasan untuk berkembang tanpa terbatas dalam pemikiran, agama, pers dan politik, tapi kebebasan bagi kaum liberal juga harus tetap dipertanggungjawabkan. Pandangan ini mulai berkembang pada abad 18-19 di Prancis dan Inggris dengan penekanan pada kebebasan Individu untuk mewujudkan kesejahteraan melalui perubahan dan inovasi organisasi sosial. Pengaruh liberalisme semakin meluas, dengan runtuhnya komunisme di penghujung abad ke-20, liberalisme menjadi semakin populer di seluruh dunia. Keruntuhan konsep tersebut menganggap liberalisme sebagai satu-satunya ideologi yang harus "diimani" dan "diamini" oleh bangsa, negara, dan umat manusia secara keseluruhan. Dengan liberalisme sebagai pilar utamanya, tampaknya peradaban dunia harus menerima penerapan tata nilai kemanusiaan baru untuk menggantikan nilai-nilai tradisional yang telah berkembang sebelumnya. Sebagai contoh, wilayah Asia dan Amerika Latin telah secara bertahap beralih dari sosialisme ke demokrasi liberal. Hal ini terlepas dari perselisihan global setelah perang dingin, yang dimenangkan oleh negara-negara liberal. Paham liberal telah melahirkan negara yang demokratis dengan semangat bertumpu pada nasionalisme yang menekankan persamaan, persaudaraan dan keadilan. Contoh negara tersebut seperti Prancis, Inggris, Jerman, Italia dan lainnya. (Wardhani, 2014)

Sejak tahun 1960-an, Jepang muncul sebagai kekuatan ekonomi global setelah kehancurannya dalam Perang Dunia II, negara ini kemudian disebut sebagai "Keajaiban Jepang". Hingga tahun 1980-an, fenomena kesuksesan ekonomi Jepang belum ada tandingannya. Banyak dari pendapat yang berasumsi bahwa keberhasilan ekonomi Jepang terutama disebabkan oleh peran utama negara (pemerintah) dalam pembangunan ekonomi. Namun pada awal tahun 1990-an, Jepang mengalami kemerosotan ekonomi yang parah yang ditandai dengan runtuhnya bubble economy, dan akibatnya memasuki masa krisis ekonomi yang berkepanjangan. Semua keadaan ini memaksa model pembangunan ekonomi Jepang yang telah lama dibanggakan untuk sekali lagi mempertanyakan formulanya, ketika Jepang tidak dapat sepenuhnya keluar dari krisis tahun. Menurut para analis Barat, krisis ekonomi Jepang pada dasarnya disebabkan oleh kegagalan kebijakan makroekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Jepang sendiri. Dengan kata lain pernyataan ini mengatakan bahwa penyebab terpuruknya perekonomian Jepang justru terletak pada peran dan pengaruh pemerintah dalam proses pembangunan perekonomian Jepang.

Tahun 1990-an ditandai dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan, yang sebelumnya dianggap sebagai kegagalan dan tanggung jawab pemerintah Jepang. Setelah itu, situasi empiris tersebut mengurangi kekuatan dan pengaruh intervensi pemerintah dalam bidang perekonomian, namun setelah Jepang memasuki lingkungan perdagangan internasional dianggap sudah tidak relevan lagi. Sementara itu, kekuatan kelompok kepentingan untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan pemerintah semakin meningkat. Krisis ekonomi telah meningkatkan tekanan internal dari kelompok-kelompok ini terhadap pemerintah untuk melakukan penyesuaian struktural guna memulihkan perekonomian. Implikasinya adalah terjadinya perubahan kebijakan ekonomi Jepang yang berbeda secara fundamental dengan periode sebelumnya dan menunjukkan adanya penurunan karakteristik model negara pembangunan Jepang.

Sejak pertengahan tahun 1990-an, banyak kebijakan pemerintah Jepang yang mengalami perubahan yang berbeda secara mendasar dari tahap pembangunan ekonomi sebelumnya. Oleh karena itu, banyak dari arah kebijakan baru dalam kebijakan ekonomi Jepang diadopsi secara paralel oleh negara-negara Eropa Barat dan Amerika. krisis ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk tingginya tingkat investasi asing, regulasi keuangan yang lemah, serta ketergantungan pada peminjaman jangka pendek dalam mata uang asing.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengupas dan memahami secara mendalam tentang fenomena yang diteliti. Sehingga menganalisis dokumen kebijakan pemerintah untuk mengidentifikasi bagaimana mereka mengkonstruksikan liberalisme, otoritarianisme, dan regulatory state. Metode ini dianggap tepat karena memungkinkan peneliti untuk menjelajahi dan memperoleh informasi yang relevan dari berbagai sumber, sekaligus memperkaya referensi yang digunakan. Prosedur pengumpulan data dilakukan selama satu minggu dengan fokus utama pada pencarian dan analisis data yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Krisis moneter di Asia berawal dari Thailand, tepatnya pada tanggal Juli 1997. Nilai mata Uang Baht mengalami depresiasi, dan utang luar negeri Thailand menumpuk semakin banyak. Sehingga menyebabkan peningkatan suku bunga, masalah kredit, dan masalah sosial, yang berdampak pada negara-negara seperti Thailand, Indonesia, Korea, dan Malaysia. Krisis ekonomi Asia 1997 menyebabkan kontraksi ekonomi, devaluasi mata uang, ketidakstabilan sektor perbankan, dan kerusuhan sosial. Dampaknya dirasakan di negara-negara seperti Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan. Jepang dan Cina juga terdampak karena investasi yang kuat di kawasan tersebut. Kontraksi ekonomi adalah dampak yang paling terasa, dengan negara-negara mengalami penurunan signifikan dalam PDB. Indonesia mengalami penurunan lebih dari yang diharapkan. Krisis ini mempengaruhi banyak aspek kehidupan ekonomi dan sosial di Asia. Pada tahun 1998, PDB Thailand dan Indonesia mengalami kontraksi ekonomi sebesar 13% dan hampir 11% masing-masing, diikuti oleh devaluasi mata uang seperti baht Thailand, rupiah Indonesia, dan ringgit Malaysia.

Krisis finansial di Asia menyebabkan devaluasi banyak mata uang di kawasan, termasuk Rupiah

Indonesia yang terdepresiasi dari Rp 2,500 per US\$ 1 menjadi Rp 16,800 pada bulan Juni 1998, meningkatkan inflasi dan biaya impor barang. Dampak lain dari krisis ekonomi Asia adalah ketidakstabilan sektor perbankan, mengungkap kelemahan dalam sektor perbankan di banyak negara di kawasan yang banyak memberikan pinjaman selama booming ekonomi di tahun 1990-an. Banyak bank mengalami kebangkrutan dan sistem keuangan runtuh dalam beberapa kasus, diikuti oleh penurunan investasi asing akibat penarikan dana investor asing dari kawasan.

Kemerosotan perekonomian di Asia sepanjang tahun 1990an disebabkan oleh aspirasi dan penanaman modal asing. Sejalan dengan dengan ini, Amerika Barat mundur sedikit mundur dari penelitiannya sehingga menyebabkan mata uang Amerika melemah dan muncul gelembung uang panas di pasar Amerika, yang pada akhirnya meningkatkan nilai dolarAS. ini menyebabkan mata uang Amerika melemah dan muncul gelembung uang panas di pasar Amerika, yang pada akhirnya meningkatkan nilai dolar AS. Akibatnya, pertumbuhan ekspor menjadi lebih lemah dan investasi asing mulai menurun. Hal ini disebabkan oleh investor yang pada awalnya melakukan investasi di negara-negara berkembang di Asia, namun akhirnya menjadi takut dan enggan untuk melakukan investasi baru ketika melihat betapa nilai mata uang lokal mengalami penurunan.pertumbuhan ekspor menjadi lebih rapuh, dan investasi asing mulai menurun . Hal ini disebabkan oleh investor yang pada awalnya melakukan investasi di negara-negara berkembang di Asia, namun akhirnya menjadi takut dan enggan untuk melakukan investasi baru ketika melihat betapa nilai mata uang lokal mengalami penurunan. dan menyebabkan krisis ekonomi di daerah-daerah tertentu.(Hunter et al., 2012)

Sejak era globalisasi, krisis keuangan menjadi lebih sering terjadi dari pada sebelumnya. salah satu alasan utamanya adalah kemajuan dalam teknologi informasi yang, sampai batas tertentu, memperbesar gelombang krisis dan mempercepat penyebarannya ke daerah atau negara lain. Alasan lain adalah perkembangan pesat dari sektor keuangan. Salah satu contoh adalah munculnya International Financial Integration (IFI). Dalam hal ini dijelaskan bahwa IFI mengacu pada “sejauh mana suatu perekonomian tidak membatasi transaksi lintas batas”. Oleh karena itu, karena sistem keuangan yang terintegrasi, timbulnya gangguan keuangan domestik di satu negara dapat mengakibatkan efek domino dengan cara mengacaukan ekonomi terintegrasi lainnya yang mengarah kepada kekacauan Keuangan global.

Namun berbeda pada krisis tahun 2008 yang berdampak kecil pada perekonomian wilayah ini karena hanya menular dari perekonomian maju. Ini mendukung bahwa perbedaan mungkin terkait dengan eksternalitas pada krisis keuangan global 2008. Krisis juga mengarah pada reformasi multi dimensional setelah Krisis Keuangan Asia Timur 1997. Kepemilikan asing, struktur keuangan, perdagangan regional, dan kebijakan moneter “countercyclical” dan fiskal akan membantu wilayah menghadapi dampak negatif krisis.

KESIMPULAN

Krisis ekonomi di Jepang pada awal tahun 1990-an menandai kemerosotan ekonomi yang parah setelah periode kejayaan ekonomi Jepang sebelumnya. Faktor-faktor seperti runtuhnya bubble economy dan kegagalan kebijakan makroekonomi pemerintah menjadi penyebab utama dari krisis tersebut. Lalu krisis ekonomi di Asia Tenggara pada tahun 1997-1998 juga memiliki dampak signifikan, terutama pada ekonomi lokal dan stabilitas politik di wilayah tersebut. Negara-negara seperti Thailand, Malaysia,

Indonesia, dan Korea Selatan mengalami penurunan nilai mata uang yang drastis dan kontraksi ekonomi yang merugikan.

Model pembangunan ekonomi di Asia Timur selama tahun 1980-an dan 1990-an, yang menggabungkan liberalisasi ekonomi dengan kontrol politik yang ketat, mengalami tantangan serius akibat krisis ekonomi. Krisis tersebut menunjukkan kelemahan dalam sistem keuangan, utang luar negeri yang tinggi, dan spekulasi mata uang. Hal ini menggambarkan adanya perubahan fundamental dalam dinamika politik ekonomi di wilayah Asia Timur. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang tantangan dan adaptasi dalam menghadapi krisis ekonomi global serta pentingnya respons yang cepat dan tepat dari pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memitigasi dampak negatif krisis ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Berg, A. (1999). *The asia crisis: causes, policy responses and outcomes*.
- Chang, H.-J. (2006). *No Title*. Amazon.Com. <https://www.amazon.com/East-Asian-Development-Experience-Miracle/dp/1842771418>
- Ferlita, S., Saepudin, E. A., Maharani, P. S., Kurniawan, I. P., Susilawati, S., & Al Fauzan, R. Z. (2024). Analisis Pembangunan Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. *MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(2), 189–195. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i2.1417>
- Goldstein, M., & Xie, D. (2009). US Credit Crisis and Spillovers to Asia. *Wiley*, 4(2), 204–222. <https://doi.org/10.1111/j.1748-3131.2009.01124.x>
- Hadiz, V. R. (2003). *The Politics of Economic Liberalisation in Indonesia: State, Market and Power*. ProQuest.
- Hoorani, H. (2020). Global Financial Crisis and Economic Growth: Analysis of The East Asia Economy. *International Journal of Science and Society*, 2(2), 265–278. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v2i2.121>
- Hunter, W. C., Kaufman, G. G., & Krueger, T. H. (2012). *The Asian Financial Crisis: Origins, Implications, and Solutions* (T. H. K. William C. Hunter, George G. Kaufman (Ed.); 1st ed.). Springer New York, NY. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-1-4615-5155-3>
- Joyce, J. P. (2000). *The Asian Crisis and the IMF: New Problems, Old Solutions? 1. INTRODUCTION 2. THE IMF AND ITS PROGRAMS*. 1(1), 109–124.
- Karmeli, E. (2008). Krisis Ekonomi Indonesia. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 2(2), 2–2008. <https://doi.org/10.21776/ub.jiae.2008.002.02.3>
- Krisis finansial Asia 1997*. (n.d.). Id.Wikipedia.Org. Retrieved April 23, 2024, from https://id.wikipedia.org/wiki/Krisis_finansial_Asia_1997#cite_note-9
- Nugroho, G. (2011). *Peran IMF Dalam Penanganan Krisis Ekonomi di Indonesia 1997/1998*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/galihnugroho/5500a82ba33311e772511915/peran-imf-dalam-penanganan-krisisekonomi-di-indonesia-1997-1998>
- OECD. (2022). *Supporting Regulatory Reforms in Southeast Asia*. OECDilibrary. <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/d0aeb03d-en>
- Pratiwi, A., Saipudin, E. A., Hotimah, N., Maulidah, S., & Yuliyani. (2024). Analisis dalam Merancang Konsep Ekonomi Kebijakan: kebijakan Ekonomi. *MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(2), 179–183. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i2.1306>
- Pratiwi, H. P., Saepudin, E. A., Padila, F., Suktiana, A., & Buwono, S. T. (2024). Analisis Kritis Kemunculan Regulatori State Pasca Krisis di Asia Timur dalam Ekonomi Politik Liberalism

- Otoriter Pemerintahan . *MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(2), 196–202. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i2.1434>
- Rosser, A. (2002). *The East Asian Economic Crisis: A Brief Overview of the Facts, the Issues and the Future. The Politics of Economic Liberalization in Indonesia: State, Market and Power*. Richmond: Curzon. Murdoch University, Asia Research Centre on Social, Political and Economic Change. <https://books.google.co.id/books?id=d7gUAQAAMAAJ>
- Sari, M. J., Saepudin, E. A., Mahriva, D., Azhani, E., Aryanto, V. P., & Nabawi, M. L. (2024). Analisis Ekonomi Politik Liberal Klasik dalam Perspektif Kebijakan Publik di Indonesia. *MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(2), 214–217. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i2.1446>
- Timmer, M. P. (2001). Financial and economic crises in Asia. *Review of Income and Wealth*, 47(1), 125–133. <https://doi.org/10.1111/1475-4991.00007>
- Utami, S. P. (2018). HUBUNGAN DAN PENGARUH ANTARA TINGKAT SUKU BUNGA DEPOSITO, NILAI INVESTASI (PMA) TERHADAP KURS DOLLAR AMERIKA SEBELUM DAN SETELAH KRISIS MONETER TAHUN 1997 Susiati Purwaning Utami. *Jurnal Ilmiah WIDYA*, 147(3).
- Wardhani, B. (2014). *Materi disampaikan pada kuliah teori hubungan internasional, departemen hubungan internasional, Universitas Airlangga*.